

ARTIKEL >> 2 - 5

- Sekilas Kiprah Bina Swadaya dalam Penanganan Bencana
- Membangun Kemitraan, Pengalaman dan Solusi Bersama
- Menumbuhkan Tanggungjawab Masyarakat terhadap Bantuan
- Menata Hidup Setelah Gempa dan Tsunami

LAPORAN UTAMA >> 6 - 9

- Mengenal Pengurangan Risiko Bencana
- Langkah Demi Langkah Penguatan Kapasitas Masyarakat
- Selama ini ketika terjadi Bencana saya hanya takut

LAPORAN KHUSUS >> 10 - 11

- Jeli melihat Potensi, siap mencegah Bencana (forum PRB Pucung)
- Air Bersih : Diburu dan direbut

PROFIL >> 12

"BAYU" sang pendukung

dari redaksi

Bina Swadaya sangat bangga dapat membagi cerita dan pengalaman melalui Warta DRR terbitan perdana ini. Warta DRR merupakan media informasi, komunikasi dan dokumentasi pengalaman melakukan kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB), khususnya bersama komunitas di wilayah Jogjakarta, Klaten dan Magelang.

Kegiatan Pengurangan Risiko Bencana berbasis Masyarakat (*Community Managed Disaster Risk Reduction = CMDRR*) mulai menjadi pintu masuk dalam meningkatkan keberdayaan suatu komunitas dan menjadi hal terpenting ketika bencana sering terjadi. Penanganan pasca bencana setelah gempa dahsyat terjadi di Yogyakarta dan Jawa Tengah bulan Mei 2006 telah menumbuhkan kesadaran bahwa selama ini fokus pendampingan masyarakat hanya mengedepankan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan peningkatan pendapatan tanpa memperhitungkan faktor risiko bencana. Akibatnya kemandirian kelompok-kelompok masyarakat secara sosial dan ekonomi yang dicapai akhirnya hancur luluh lantak oleh bencana yang datangnya tiba-tiba, sementara masyarakat tidak siap menghadapi dampak bencana tersebut.

Sesaat setelah terjadi suatu bencana, maka tindakan yang harus dilakukan segera adalah penanganan tanggap darurat dengan memberikan bantuan. Pasca tanggap darurat, fase dan tindakan selanjutnya adalah rehabilitasi dan rekonstruksi, merupakan rangkaian manajemen krisis pasca bencana. Sementara itu pengurangan risiko bencana atau manajemen risiko merupakan bagian dari pembangunan dimana masyarakat melakukan kajian, perencanaan untuk menanggulangi bencana dan meminimalisir risiko merugikan akibat suatu bencana yang mungkin terjadi atau berulang, selanjutnya masyarakat cepat memulihkan diri dari dampak bencana tanpa ketergantungan dari pihak luar. Upaya-upaya mengelola risiko bencana inilah yang mulai dilakukan saat ini.

Warta DRR edisi perdana ini membagikan pengalaman dalam mengenali kegiatan pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Langkah awal yang mesti dilakukan adalah

mengenali ancaman atau bahaya yang berpotensi menimbulkan bencana, kemudian melakukan kajian dan analisa risiko bencana dengan mengidentifikasi tingkat kerentanan dan kapasitas masyarakat dalam mencegah, mengurangi dan menanggulangi kemungkinan terjadinya bencana di lingkungan sekitarnya.

Strategi membuat rencana-rencana mitigasi, kesiapsiagaan, membangun sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas individu dan komunitas dilakukan melalui pengorganisasian kelompok masyarakat yang diwujudkan dalam pembentukan Forum PRB (Pengurangan Risiko Bencana), juga pelibatan dan aksi dari beragam pemangku kepentingan (*stakeholder*). Forum PRB Pucung memberikan gambaran bagaimana masyarakat di dusun Pucung, desa Wukirsari, Kabupaten Bantul, Jogjakarta melakukan persiapan, pencegahan dan tanggap bencana kekeringan melalui pengelolaan dan pelayanan air bersih bagi masyarakat dusun.

Keberhasilan pada tahap awal kegiatan pengurangan risiko bencana disadari tidak terlepas dari adanya dukungan dan kerjasama beragam stakeholder terutama pemerintah lokal. Profil tokoh yang sangat berpengaruh dalam pengembangan Forum PRB Pucung adalah sang Kepala Desa. Sisi lain informasi yang dibagikan adalah pengalaman Bina Swadaya melaksanakan kegiatan penanganan pasca bencana di Aceh dan Bengkulu, serta kiprah Cordaid dalam isu PRB turut melengkapi pemahaman akan perbedaan kegiatan penanganan pasca bencana dan pengurangan risiko bencana.

Semoga anda senang membaca Warta DRR ini dan selanjutnya bersedia berbagi pengalaman dengan lainnya (is).

Sekilas Kiprah Bina Swadaya dalam Penanganan Bencana

Secara histografis, Indonesia menjadi pelanggan gempa bumi dan tsunami yang terjadi hampir setiap tahun. Data dari Direktorat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (DVMBG) Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral menunjukkan bahwa ada 28 wilayah di Indonesia yang dinyatakan rawan gempa dan tsunami. Di antaranya Nanggroe Aceh Darrusalam (NAD), Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Banten, Jateng dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) bagian Selatan, Jawa Timur bagian Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT). Kemudian Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku Utara, Maluku Selatan, Biak, Yapen dan Fak-Fak di Papua serta Balikpapan di Kalimantan Timur.

Semenjak Gunung Krakatau meletus pada tahun 1883 yang menyebabkan tsunami besar, setidaknya telah terjadi 17 bencana tsunami besar di Indonesia selama hampir satu abad (1900-1996). Bencana gempa dan tsunami besar terakhir terjadi pada akhir 2004 di Aceh dan sebagian Sumatera Utara. Lebih dari 150.000 orang meninggal dunia pada saat kejadian. Usai gempa Aceh, tahun 2005 Pulau Nias dan sekitarnya juga digoyang gempa. Sekitar 1000 orang menjadi korban. Akhir Mei 2006, giliran Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah diporakporandakan gempa bumi. Korban meninggal mencapai 5.000 orang lebih dan 1,5 juta orang kehilangan tempat tinggal. Bengkulu dan Dompu pun pada tahun 2007 tidak luput dari gempa yang menghancurkan ribuan rumah penduduk.

Menghadapi bencana yang beruntun, Bina Swadaya berpartisipasi aktif melakukan aksi-aksi kemanusiaan bagi masyarakat dampingan ataupun bukan dampingan. Bina Swadaya adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang didirikan pada tahun 1958 dan merupakan salah satu lembaga swadaya masyarakat yang terbesar di Indonesia. Lembaga ini berbasis di Jakarta dan wilayah kerjanya meliputi seluruh propinsi di Indonesia dimana di beberapa propinsi memiliki kantor-kantor cabang yang disebut gugus wilayah. Dalam usianya lebih dari seperempat abad, Bina Swadaya telah mengembangkan dan menghasilkan beragam aktivitas yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 program utama, yaitu (1) pengembangan keuangan mikro, (2) pemberdayaan kelompok swadaya masyarakat, dan (3) pengembangan agribisnis dan komunikasi. Tujuan Bina Swadaya adalah meningkatkan kemandirian dan keberdayaan masyarakat, terutama masyarakat strata sosioekonomi yang selama ini terpinggirkan, berlandaskan prinsip-prinsip keterbukaan, solidaritas dan keadilan sosial yang menghargai nilai-nilai serta martabat kemanusiaan.

Ada 3 strategi intervensi yang dilakukan oleh Bina Swadaya, yaitu (1) mengedepankan kelembagaan pendamping yang berkemampuan sebagai penggerak tumbuh-kembangnya organisasi- organisasi masyarakat yang disebut KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), (2) menyebarkan

informasi, dan (3) membangun kerjasama yang aktif dan mutual dengan pemerintah, kelompok madani, lembaga swadaya masyarakat lokal dan internasional, serta sektor swasta di dalam maupun luar negeri.

Sepak terjang Bina Swadaya dalam aksi-aksi kemanusiaan yang terkait dengan kejadian bencana, antara lain:

- Bantuan untuk korban banjir di wilayah Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi (Jabotabek) dan Jepara (1998 – 2000).
Bantuan berupa penyediaan pangan dan sarana produksi pertanian (bibit dan pupuk) bagi masyarakat yang terkena banjir. Masyarakat korban banjir itu merupakan masyarakat dampingan Bina Swadaya di Gugus-gugus wilayah yang mengalami gagal panen
- Bantuan korban bencana gempa bumi di Bengkulu (2000). Pada tahun 2000 Bina Swadaya membantu masyarakat korban gempa bumi di wilayah Bengkulu Selatan (2 desa). Bina Swadaya melakukan identifikasi kebutuhan, musyawarah dengan masyarakat, memberi bantuan seng dan papan kayu. Sebelum bantuan diberikan terlebih dahulu dilakukan identifikasi terhadap keluarga-keluarga yang membutuhkan dengan melibatkan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Bengkulu, RT/RW, dan pihak-pihak terkait.
- Bantuan korban banjir di Situbondo Jawa Timur (2001). Melalui kerjasama dengan *United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (UN OCHA)*, Bina Swadaya melakukan kegiatan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat miskin di wilayah Situbondo yang terkena musibah banjir pada tahun 2001. Bantuan yang diberikan berupa bahan-bahan pangan dan buku tulis.
- *Task Force* Bina Swadaya (TFB) untuk Gempa Bumi & Tsunami di Propinsi NAD – Sumatera Utara. Kegiatan yang dilakukan adalah penjajagan kebutuhan korban bencana, yang dilanjutkan dengan aksi-aksi bantuan.
- *Earthquake and Tsunami Emergency Support Project – Asian Development Bank Paket 16 & 17* di NAD dan Sumatera Utara (Oktober 2005 – Juni 2008)
Kegiatan ini dilakukan di 14 Kabupaten/Kota di NAD dan 2 Kabupaten di Pulau Nias (Sumatera Utara), dengan melakukan penguatan kelembagaan kelompok swadaya masyarakat dan pendampingan pemulihan serta peningkatan pendapatan di sektor pertanian, perikanan, dan pengembangan sistem irigasi.
- Pemberdayaan Masyarakat Korban Tsunami Aceh melalui Keuangan Mikro (Januari – Desember 2006). Kegiatan yang dilakukan meliputi pendampingan dan pembentukan kelompok, serta pendampingan dan pembinaan keuangan mikro.
- Program *Community Empowerment on Micro-Scale Industry Recovery Post Earthquake in Bantul-Yogyakarta and Klaten District Central Java*, kerjasama dengan Japan International Cooperation Agency/JICA (Juni 2006 – Maret 2007).
Tujuan program adalah pemulihan produksi pengusaha industri kecil yang menjadi korban gempa. Kegiatan yang dilakukan meliputi penguatan kelompok swadaya masyarakat, pelatihan-pelatihan, konsultasi, dan pengadaan intensif alat dan bahan baku industri mikro.

- Rehabilitasi dan rekonstruksi rumah penduduk akibat gempa bumi di Propinsi Bengkulu bulan September 2007, kerjasama dengan pemerintah Propinsi Bengkulu melalui dana stimulan pembangunan 53.172 rumah rusak dan pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat Perumahan.

Dan yang tengah didampingi oleh Bina Swadaya adalah masyarakat dan forum di dusun Gajihan – Klaten; dusun Pucung, desa Wukirsari – Bantul; dan desa Ngargomulyo – Magelang, untuk proyek Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat. Proyek ini berlangsung hingga tahun 2010. Kegiatan PRB di tiga lokasi tersebut dapat terlaksana berkat dukungan Cordaid.



Membangun Kemitraan, Pengalaman & Solusi Bersama

Anat Prag - Cordaid Liaison Office Yogyakarta

Cordaid (*The Catholic Agency for Development and Relief*, Belanda) memiliki pengalaman dan keahlian lebih dari 80 tahun dalam menyalurkan bantuan untuk situasi darurat dan bantuan pengentasan kemiskinan. Lembaga ini merupakan salah satu organisasi internasional terbesar dengan jumlah mitra kerja yang hampir mencapai seribu dan tersebar di 36 negara meliputi Afrika, Asia, Eropa Tengah dan Timur, dan Amerika Selatan. Mitra-mitra tersebut bergerak dalam berbagai isu, termasuk pelayanan kesehatan, peningkatan kualitas masyarakat di perkotaan, akses dan partisipasi terhadap perekonomian.

Sejak tahun 2006, Cordaid melalui mitra-mitra lokal di Indonesia bekerja pada isu penguatan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana. Melalui program ini diharapkan semakin banyak orang yang mampu bertahan dari bencana, kelompok-kelompok rentan mampu membangun kembali hidupnya setelah bencana serta memberdayakan dirinya sendiri.

Prakarsa Cordaid dalam pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat melibatkan 10 mitra kerja di seluruh Indonesia dimana semuanya membangun proses pengurangan risiko bencana melalui berbagai sektor. Misalnya, pendidikan, kesehatan, resolusi konflik, pemberdayaan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi.

Cordaid melihat bahwa pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat merupakan sebuah proses pemberdayaan komunitas dimana bencana alam menjadi pintu masuknya, yang dilanjutkan dengan kajian keterlibatan masyarakat, perencanaan untuk mencegah bencana dan mengurangi risikonya, pengorganisasian kelompok masyarakat, pelibatan dan aksi dari beragam pemangku kepentingan. Kadangkala diperlukan pula advokasi di pemerintahan, baik di tingkat desa maupun kabupaten.

Cordaid dengan senang hati mendukung masyarakat dalam mengurangi risiko bencana alam melalui mitra-mitranya yang tersebar di nusantara. Dari ujung barat pulau Simeulue di Aceh hingga tepi timur Nabire di Papua, 10 mitra Cordaid mendampingi 50 kelompok masyarakat. 25 masyarakat telah melakukan analisis dan kajian risiko bencana, 21 masyarakat mengembangkan rencana-rencana pengurangan risiko bencana, dan 13 masyarakat melaksanakan pengurangan risiko bencana.

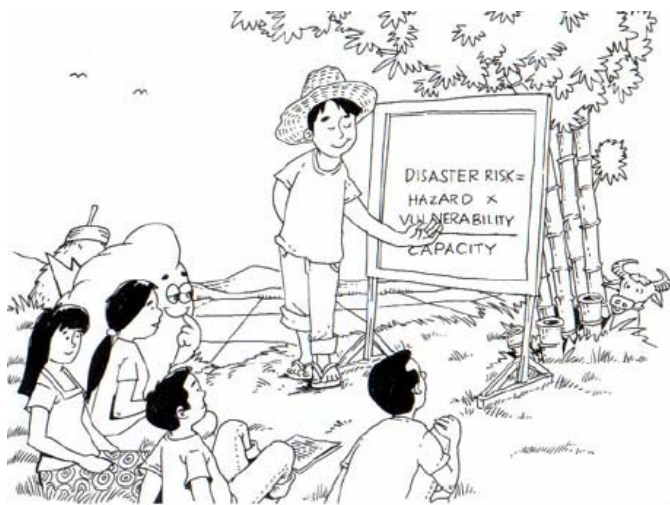
Kegiatan yang telah dilaksanakan masyarakat, antara lain, melakukan persiapan dan tanggap bencana, yaitu pembangunan jalur evakuasi, perencanaan jaminan ekonomi, pelatihan P3K, meningkatkan kesehatan masyarakat, dan perencanaan ketersediaan pangan dengan menanam singkong dan hotong untuk kebutuhan sehari-hari serta disimpan di lumbung.

Selain itu, masyarakat telah melakukan kegiatan pengembangan mitigasi dan penguatan masyarakat. Seperti, penanaman pohon dan pembuatan terasering untuk meminimalisir risiko longsor, penanaman mangrove untuk mengurangi risiko abrasi laut dan gelombang pasang-surut, perancangan peraturan desa untuk pengelolaan sumber daya air serta memastikan penegakan hukum tersebut, pembersihan puing-puing akibat longsor, pembuatan jalur air secara vertikal sepanjang lereng untuk mencegah terjadinya perusakan alam dan mengurangi potensi longsor, pengembangan kapasitas organisasi, kegiatan pengumpulan dana, pembuatan proposal, pengembangan jejaring untuk membuka akses ke lembaga donor, kegiatan-kegiatan infrastruktur skala kecil seperti pengadaan air bersih, perbaikan jalur evakuasi, dan menanam bibit pohon untuk mencegah erosi yang didanai oleh pemerintah lokal.

Kegiatan advokasi yang paling menonjol saat ini yang tengah dilakukan oleh mitra Cordaid adalah advokasi agar materi PRB diintegrasikan melalui sekolah-sekolah di propinsi dan kabupaten. Meskipun sudah dilakukan upaya dan lobi untuk hal ini, namun semua mitra mengakui bahwa proses lobi ini tetap akan memakan waktu yang panjang. Advokasi

berikutnya adalah masuknya forum atau kelompok PRB di dalam struktur pemerintahan daerah dan diakui keberadaannya oleh pemangku kepentingan yang lebih luas. Hal ini sesuai amanat UU Penanganan Bencana No. 24/2007 yang menyatakan komitmen pemerintah dalam membangun struktur dan mekanisme berdasarkan struktur, penilaian, dan tanggapan masyarakat sebagai kunci utama strategi pengelolaan bencana di Indonesia.

Cordaid juga mendukung mitra-mitranya yang melakukan upaya pengarusutamaan penanganan bencana melalui pemanfaatan teknologi. Dalam hal ini, Cordaid membuat situs untuk mitra-mitranya yang dapat digunakan sebagai sarana berbagi pengalaman dan pembelajaran. Sementara itu, 6 mitra menggunakan situs organisasinya untuk mempromosikan kegiatan-kegiatan PRB di Indonesia dan 4 mitra telah atau sedang mempersiapkan publikasi refleksi pengalaman dan buah-buah pembelajarannya. Saat ini di Indonesia Cordaid bermitra dengan Asian Moslem Action Network (AMAN) Indonesia, INSIST, Bina Swadaya, Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian (PSPP), PRIMARI, Perdhaki, Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia (MPBI), Pusaka Indonesia, Karina, Catholic Relief Services / Indonesia.



untuk memurnikan pikiran,
mulailah dengan mengurangi hasrat
dan mengenal kebahagiaan
untuk memurnikan lingkungan,
mulailah dengan
memberikan perhatian untuk orang lain
(Master Sheng Yen)

Menumbuhkan Tanggung Jawab Masyarakat Terhadap Bantuan

Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Penduduk

Gempa bumi yang melanda Propinsi Bengkulu tanggal 12 September 2007 telah meluluhlantakkan ribuan rumah. Untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan rumah dan meningkatkan kehidupan masyarakat pasca gempa tersebut, Pemerintah Propinsi Bengkulu bekerjasama dengan Bina Swadaya melakukan fasilitasi dan pendampingan untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain melakukan rekonstruksi, dilakukan pula pendampingan untuk pemulihan mata pencaharian dan peningkatan kehidupan masyarakat. Diharapkan masyarakat mampu mengelola dan mengembangkan usaha-usahanya, baik usaha yang sudah atau pernah mereka lakukan maupun yang baru akan dijalankan.

Pada tahun itu juga, sebanyak 53.172 KK mendapat dukungan dana dari DIPA Kementerian Koordinator Bidang Kesra RI untuk merekonstruksi rumah mereka. Pemberian bantuan berdasarkan tiga kategori. Kategori pertama, rusak berat, menerima bantuan sebesar Rp 15 juta. Rusak sedang menerima Rp 10 juta, dan rusak ringan Rp 5 juta. Pemberian dana dilakukan melalui tiga tahap. Tahap I dicairkan 20% dari jumlah dana bantuan, tahap II pencairan dana sebesar 80%, dan tahap terakhir dicairkan sisanya atau sebesar 10%. Bantuan ini disampaikan melalui wadah Kelompok Swadaya Masyarakat-Perumahan (KSM-P) agar masyarakat dapat meningkatkan kemampuannya dalam mengelola dana bantuan, dan kerjasama para pemangku kepentingan (*stakeholder*) di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten dapat juga dapat ditingkatkan melalui penguatan organisasi masyarakat.

Kegiatan yang dilakukan melalui program yang dikenal dengan nama Program Pendampingan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Rumah Penduduk Akibat Bencana Gempa Bumi di Propinsi Bengkulu, antara lain, rekrutmen tenaga fasilitator. Sebanyak 532 fasilitator pemberdayaan/lapangan, 19 koordinator fasilitator, dan 2 koordinator wilayah direkrut. Setelah tim terbentuk, dilaksanakan *team building*, pelatihan, dan selanjutnya mereka siap ditugaskan di seluruh propinsi. Kegiatan selanjutnya adalah sosialisasi program di tingkat propinsi dan kabupaten agar pemerintah dan pemangku kepentingan mengenal serta mendukung kegiatan program.

Di tingkat masyarakat, kegiatan yang dilaksanakan adalah menyelenggarakan pelatihan administrasi, pertukangan, konstruksi tahan gempa, pemulihan mata pencaharian, dan pendampingan teknis serta kelembagaan untuk terbangunnya struktur organisasi.

Diakhir proyek tahap I, sebanyak 5.084 KSM-P (54.443 KK) telah menerima manfaat dana bantuan sebesar 20% untuk mulai memperbaiki dan membangun rumah kembali. Pada tahap I ini, selain mencairkan dana bantuan, tujuan proyek

adalah menumbuhkan kesadaran dan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dana yang diterima. Caranya, masyarakat diajak membuat Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Laporan Penggunaan Dana (LPD) berdasarkan bahan-bahan yang telah dibeli dan melakukan pengorganisasian serta kerjasama dalam kelompok.

Rumah-rumah yang rusak akibat gempa mulai diperbaiki, selain itu kegiatan pendampingan pemulihan mata pencaharian dan peningkatan kehidupan telah memunculkan gagasan-gagasan untuk memulai usaha bersama di KSM-P dalam bentuk usaha simpan pinjam.

Pada pertengahan tahun 2008, Program Pendampingan Recovery Bengkulu tahap I selesai dilaksanakan dan hasilnya mendapat tanggapan sangat positif dari semua pihak. Pendekatan kegiatan melalui KSM-P dinilai berhasil membangun kesepakatan sosial di antara anggotanya untuk bergotong royong memperbaiki atau membangun rumah, mendorong mengembalikan kearifan lokal dalam perancangan dan pembangunan rumah, dan mengedepankan peran serta posisi perempuan sebagai agen perubahan dan pembangunan.

Tahun 2009 ini, program tahap 2 sedang berjalan dengan mencairkan dana bantuan 80% untuk proses pembangunan rumah dan akan dilanjutkan dengan pencairan dana 10%. Pastinya pembangunan penanggulangan bencana berbasis masyarakat di Bengkulu akan lebih optimal dan kemampuan masyarakat dalam mengelola bantuan semakin meningkat pula! (is)

Menata Hidup Setelah Gempa dan Tsunami

Bencana gempa dan tsunami di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pulau Nias (Sumatra Utara) pada tanggal 24 Desember 2004 menyebabkan 126.000 orang meninggal, 94.470 orang hilang, kerusakan sarana dan prasarana, perubahan kondisi geografis maupun lumpuhnya kegiatan mata pencaharian masyarakat. Bina Swadaya bekerjasama dengan Asian Development Bank – *Earthquake and Tsunami Emergency Support Project* (ADB – ETESP) terlibat dalam kegiatan pemulihan kehidupan di NAD dan Nias sebagai lembaga non-pemerintah yang membantu sektor pertanian, perikanan, dan irigasi. Keterlibatan Bina Swadaya dalam kegiatan tersebut berlangsung selama 3 tahun, yaitu dari Oktober 2005 hingga Juni 2008.

Sebanyak 17 kabupaten menjadi lokasi layanan konsultasi Bina Swadaya. Yaitu 15 kabupaten/kota di NAD dan 2 di Nias, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Pidie, Bireuen, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Jaya, Aceh Barat, Nagan Raya, Aceh Barat Daya, Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Simeulue, Nias, dan Nias Selatan.

Pemulihan mata pencaharian

Bina Swadaya memberikan pelayanan konsultasi pemulihan mata pencaharian masyarakat. Tujuannya untuk

memberdayakan masyarakat dan mengkaitkan masyarakat dengan sumber-sumber pendanaan yang ada dalam proyek ETESP. Layanan konsultasi yang diberikan antara lain, konsultasi untuk mengembangkan 2.000 KSM di desa-desa, yang pemilihannya berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Dinas Pengairan setempat. Penguatan kelembagaan KSM dilakukan dengan cara memotivasi revitalisasi kegiatan KSM, pendistribusian tugas pengurus, dan melakukan pertemuan rutin.

Masyarakat yang terkena bencana tsunami ditata, dilatih, dan diberdayakan untuk mampu melaksanakan pemulihan mata pencaharian mereka dan melakukan manajemen sumberdaya pesisir dan berbasis masyarakat. Untuk itu, mereka mendapat ketrampilan peningkatan pendapatan, dan diajak membentuk jasa keuangan mikro tingkat desa. KSM-KSM tersebut juga dipandu agar mampu menjalin hubungan dengan berbagai jasa atau peluang lainnya di bawah komponen-komponen ETESP, serta dari sumber-sumber instansi pemerintah lainnya, program bantuan dari lembaga donor, lembaga swadaya masyarakat lokal dan mancanegara. Masyarakat juga diberikan dukungan dalam menyusun kembali catatan kepemilikan lahan dan menghubungkan dengan instansi terkait.

Mobilisasi dan penguatan

Sebagai tenaga pendamping, dilakukan perekrutan, pelatihan, dan mobilisasi *Village Mobilization Facilitator* (VMF). Sebanyak 106.698 orang telah dilatih menjadi fasilitator, dengan perincian terdiri dari 64.742 laki-laki dan 41.956 perempuan. Jumlah ini melebihi target sebanyak 8%.

Bina Swadaya juga memfasilitasi rencana pembangunan irigasi dan penyiapan kelembagaannya, memberikan bimbingan konsultasi pencatatan/administrasinya, dan menumbuhkan kesadaran pemupukan modal melalui kegiatan menabung.

Beberapa kelompok yang mulai melakukan kegiatan simpan pinjam, yaitu Aceh Utara sebanyak 4 kelompok, Aceh Barat Daya 1 kelompok, Siemelue 2 kelompok, Nias sebanyak 5 kelompok dan Nias Selatan sebanyak 6 kelompok

Dalam rangka upaya membangun *linkage* program, Bina Swadaya secara aktif terlibat dalam pertemuan diskusi yang diadakan oleh pihak-pihak lain diluar ETESP. Selanjutnya, Bina Swadaya merintis peluang kerjasama dengan pihak-pihak tersebut. Beberapa institusi yang telah melakukan program untuk KSM antara lain, Asia Little One (ALO), GRDI, BRR, Yayasan Emergency Unit (Yacub), Yayasan Sepakat, Citibank Group dan Dutch Bank.

Saat ini program ETESP telah selesai pelaksanaannya. Banyak pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman selama mendampingi masyarakat di NAD dan Nias. Antara lain, pentingnya keterlibatan perempuan dalam program - mulai dari perancangan hingga evaluasi, merancang tatakelola program yang efektif melalui sistem satu atap, penentuan target korban tsunami dan gempa secara tepat, prosedur yang transparan dalam penyaluran hibah, dan membangun jejaring sumberdaya dari berbagai pemangku kepentingan (ss/fu/ap).

Mengenal Pengurangan Risiko Bencana

UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana merumuskan pengertian bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh alam, non-alam, dan manusia, yang menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pandangan konvensional yang beredar selama ini menyatakan bahwa bencana merupakan kejadian yang tidak terduga dan tidak dapat dicegah. Sehingga yang menjadi fokus adalah tanggap darurat (*emergency response*) dan pemulihan fisik, material, serta teknis. Orang-orang yang tertimpa bencana merupakan korban yang tidak berdaya dan harus ditolong oleh orang pihak lain.

Namun kini beredar pandangan lebih progresif. Yaitu, bencana dapat diduga serta dicegah. Karena dapat diduga dan dicegah, maka perlu dilakukan kesiapan untuk mengurangi risiko yang timbul akibat bencana dan yang perlu mempersiapkan adalah masyarakat itu sendiri.

Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Masyarakat atau *Community Managed Disaster Risk Reduction (DRR)* merupakan bagian dari pencegahan bencana. Hal ini juga tercantum dalam UU Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan terkait untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana.

Kajian dalam PRB

Untuk mengurangi dan mencegah bencana, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengenal bencana yang mungkin terjadi di wilayah sekitar. Caranya dengan melakukan kajian ancaman, baik dari jenis bencana yang biasa atau mungkin terjadi, tingkat risiko, frekuensinya, waktu dan lamanya, wilayah yang terkena, serta perkembangan dan bahaya ikutannya. Jenis-jenis ancaman dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang disebabkan oleh alam (*natural hazard*) dan yang disebabkan oleh ulah manusia (*man-man hazard*). *United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UN ISDR)* mengelompokkan bahaya menjadi bahaya geologi, bahaya hidrometeorologi, bahaya biologi, bahaya teknologi, dan penurunan kualitas lingkungan.

Kajian selanjutnya adalah kajian kerentanan, yaitu mengidentifikasi lokasi yang rawan bencana, siapa yang paling rentan ketika bencana terjadi baik dari status sosial ekonomi, jenis kelamin, umur, dan lain-lain. Selain mengidentifikasi manusia, juga diidentifikasi sumberdaya alam lainnya yang rentan terkena dampak bencana seperti keragaman hayati dan lingkungan hidup.

Perlu pula melakukan kajian kemampuan atau kapasitas masyarakat dalam mengantisipasi bencana yang mungkin datang. Kajian ini dilakukan untuk memetakan kekuatan dan sumber-sumber yang dimiliki oleh perorangan, rumah tangga, dan masyarakat, yang membuat mereka mampu

mencegah, mengurangi, siap siaga, menanggapi dengan cepat atau segera pulih dari bencana. Misalnya, kesadaran masyarakat terhadap ancaman bencana, adanya prediksi (ramalan) tentang kemungkinan bencana dan peringatan dari lembaga yang berwenang, adanya upaya pencegahan dan mitigasi, kesiapan dan kemampuan masyarakat bersama dengan pemerintah dan lembaga-lembaga lain dalam menanggapi bencana.

Kajian-kajian di atas dilakukan dengan menggunakan alat-alat kajian ancaman yang diadaptasi dari PRA, seperti peta desa/dusun, sejarah desa, bagan kecenderungan dan perubahan, kajian mata pencaharian, kalender musim, transek, sketsa kebun dan rumah, diagram venn (hubungan kelembagaan), dll.

Pengkajian risiko bencana ini dilakukan untuk memahami pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana yang memungkinkan mereka mengembangkan strategi penanggulangannya, memahami sumberdaya yang tersedia dan digunakan dalam masyarakat untuk mengurangi risiko serta memahami siapa yang memiliki akses ke sumberdaya ini dan siapa yang memiliki kuasanya. Kajian ini merupakan langkah penting dalam memilih strategi pengurangan risiko dan penguatan kemampuan masyarakat. Merupakan suatu kesalahan bila kemampuan masyarakat diabaikan dalam perancangan program karena hanya akan menyalakan sumber dari luar yang sedikit dan belum tentu dapat diaplikasikan, dan pada gilirannya justru berpeluang meningkatkan kerentanan masyarakat itu sendiri.

Proses dan rangkaian kajian yang dilakukan bersama-sama masyarakat akan meningkatkan kesadaran serta kewaspadaan masyarakat itu sendiri, menyiapkan masyarakat secara fisik dan psikologis terhadap kemungkinan bencana alam yang akan datang dengan merumuskan rencana aksi bersama. Rencana aksi diformulasikan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dalam mencegah dan mengurangi dampak bencana.

Rencana aksi tersebut akan diimplementasikan oleh dan bersama masyarakat serta elemen-elemen pemangku kepentingan yang dekat dengan kehidupan masyarakat dan memberikan dukungan atau bantuan baik pada tahap manajemen krisis maupun manajemen risiko. Dukungan dan kemitraan dengan pihak-pihak terkait lainnya akan mempercepat proses pembangunan sistem pengurangan bencana. Para pemangku kepentingan yang memiliki peran dalam pengurangan risiko bencana antara lain, aparat dusun dan desa dari tingkat RT, RW, dusun, hingga desa, tokoh masyarakat dan agama, organisasi kemasyarakatan seperti Karang Taruna, PKK, organisasi-organisasi kerelawanan serta pecinta alam, dll.

Siklus penanganan bencana

Hal lain yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko bencana adalah mengenali siklus penanganannya. Pada saat terjadi bencana, hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan penanganan tanggap darurat. Setelah fase tersebut selesai, baru dilanjutkan dengan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pengelolaan pada tahap ini dikenal dengan istilah **manajemen krisis**.

Untuk meningkatkan peran dan fungsi masyarakat dalam mencegah, mengurangi dan mengelola bencana secara optimal, maka perlu dilakukan perencanaan pembangunan

yang matang, menyeluruh, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Perencanaan tersebut ditindaklanjuti dengan kegiatan-kegiatan pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan. Misalnya dengan melakukan upaya-upaya fisik, teknis dan pengelolaan lingkungan, serta membangun jejaring kerja. Proses ini dikenal dengan sebutan **manajemen risiko**.

Peran PRB dalam siklus bencana justru lebih ke arah pra bencana atau manajemen risiko, dan hanya sebagian dikerjakan pada situasi tanggap darurat (penanganan dan bantuan).

Hak dan ketahanan masyarakat

Risiko bencana dapat diminimalisir dampak, ancaman dan kerentanannya jika kapasitas (potensi) hidup bisa ditingkatkan kualitasnya antara lain melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat seperti hak ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, dll.



Dengan terpenuhinya hak-hak dasar tersebut, apalagi ditambah pengetahuan serta pemahaman tentang sumberdaya, cara, dan kekuatan yang ada di masyarakat, maka warga memiliki daya tangkal dan daya tahan yang lebih baik dalam mengantisipasi, menangani dan mengurangi bencana yang terjadi, begitu pula dampaknya.

Melalui pemahaman dan pelaksanaan PRB diharapkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi risiko bencana dapat berkembang dan benar-benar membangun ketahanan masyarakat dan terpenuhinya hak masyarakat terhadap keamanan serta kesejahteraan (ss).

Langkah demi Langkah Penguatan Kapasitas Masyarakat

Workshop klarifikasi rencana program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tahap 2 yang diselenggarakan pada bulan September 2008 menandai dilanjutkannya Program Pembangunan Kapasitas Pengurangan Risiko Bencana untuk Staf, Masyarakat, dan Mitra-Mitra Kerja Bina Swadaya. Workshop diikuti oleh para pendamping lapangan, pemangku kepentingan desa, dan pengurus forum untuk menjelaskan dan memutuskan bersama rencana tindak lanjut pelaksanaan kegiatan program hingga tahun 2010.

Prioritas forum

Dalam workshop tersebut dibahas prioritas penguatan kapasitas di setiap wilayah kerja forum PRB. Di wilayah Jogjakarta, pengembangan dan peningkatan kapasitas forum dusun Pucung - Bantul, difokuskan pada pemetaan dan pembangunan pipa air, menampungan dan penyaluran air ke rumah-rumah warga. Tujuannya mengentaskan masalah kekeringan serta kesulitan air yang selalu menjadi ancaman bagi warga. Sementara itu, prioritas di desa Ngargomulyo - Magelang adalah penguatan kapasitas untuk membangun kesiapsiagaan menghadapi bencana gunung berapi dan konservasi lingkungan alam sekitar gunung. Sedangkan di dusun Gajihan-Klaten prioritasnya ialah penguatan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi gempa.

Pelatihan pemahaman PRB

Untuk menjawab kebutuhan forum dan mendukung penguatan kapasitas masyarakat, maka selama akhir tahun 2008 digelar berbagai macam pelatihan.

Pelatihan pemahaman PRB kepada aparat desa, anggota PKK, Karang Taruna, kelompok pengajian, dll, diselenggarakan agar peserta dapat menemukan apa yang terjadi pada saat bencana terakhir (gempa dan letusan gunung Merapi), dan untuk di masa mendatang peserta paham apa yang dapat dilakukan sebelum, selama, dan sesudah bencana. Forum di Yogyakarta menyelenggarakan pelatihan ini pada 13-14, 15-16, dan 20-21 Oktober, narasumber dari Institut for Research and Empowerment. Sementara Klaten 25-26, 29-30 Oktober dan 3-4 November dan yang menjadi narasumber adalah Kasi Perencanaan, Badan Perencanaan dan Pembangunan Desa (Bappedes). Sedangkan di Magelang tanggal 10-11, 12-13, 14-15 November. Pelatihan ini mendapat dukungan dari setiap kepala desa. Mereka melihat kegiatan tersebut sebagai hal yang positif dan yakin dapat meningkatkan pengetahuan serta kepedulian masyarakat terhadap pengurangan risiko bencana. Kegiatan ini juga memberikan kontribusi kepada pemerintah lokal dan lembaga-lembaga lain di tingkat desa dalam menata ulang sistem PRB. Sebagai tindak lanjut, peserta mensosialisasikan materi-materi pelatihan kepada keluarga, tetangga, dan kelompok dimana mereka menjadi anggota.

Selain untuk orang-orang dewasa, pelatihan PRB juga diberikan untuk anak-anak. Anak-anak adalah golongan yang paling riskan terkena dampak bencana. Akan tetapi, seringkali anak-anak juga dilupakan dalam menentukan

kebijakan tentang penanganan bencana. Cerita kegiatan ini dapat disimak di bagian lain dari edisi ini.

Kapasitas mengelola forum

Agar forum dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola organisasi dengan lebih maksimal maka pengurusnya menyelenggarakan pelatihan manajemen organisasi. Melalui pelatihan dibangun semangat kerja yang bersendikan jiwa dinamis dan kreatif, berwawasan keadilan jender, dan memiliki visi ke depan dalam semangat kebersamaan dan kesetiakawanan. Di Yogyakarta, pelatihan yang juga diikuti oleh Kepala Desa, diselenggarakan pada 2-4 Desember. Klaten menyelenggarakannya tanggal 21-30 November, sedangkan Magelang 30 Oktober-1 Desember.

Setelah meletakkan fondasi pengelolaan organisasi, pengurus forum membekali diri melalui pelatihan manajemen keuangan dan pengumpulan dana (*fund raising*). Di Yogyakarta pelatihan dilaksanakan tanggal 9-11 Desember, Klaten pada 3-5 Desember, dan Magelang 15-17 Desember. Pelatihan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kelembagaan pengurangan bencana bukanlah lembaga yang hanya berdiri berdasarkan order proyek. Sangat diharapkan lembaga ini tetap eksis tanpa dukungan dari Bina Swadaya ataupun Cordaid. Manajemen *fund raising* ini dimaksudkan agar para pengurus mampu menjalankan organisasi bersumber pada kemampuan diri sendiri.

Ketrampilan yang didapat langsung dipraktekkan oleh Divisi Kekeringan dan Banjir FPRB dusun Pucung dalam mengelola dana kontribusi masyarakat yang dipakai untuk perawatan pipa. Pengurus forum di Klaten merencanakan pembuatan pupuk organik sebagai kegiatan pengumpulan dana. Hal itu terkait pula dengan upaya meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Sedangkan di Magelang, forum akan mengadakan ekowisata, *live in*, dan *outbound*. Untuk itu mereka akan mengadakan pelatihan *tour guiding* dan bekerjasama dengan agen perjalanan untuk mempromosikan program-program tersebut.

Pelatihan sistem distribusi air

Pelatihan pengelolaan air dilakukan oleh forum di Yogyakarta yang mendapatkan mandat dari desa untuk mengelola sarana air bersih. Tanpa adanya pengetahuan tentang perpipaan, cukup sulit bagi mereka untuk melaksanakan pemeliharaan dan penyambungan air bersih dari pusat penampungan ke rumah-rumah pelanggan. Pemetaan perpipaan serta ukuran pipa juga menjadi kendala bagi para pengurus dan operator lapangan. Karenanya, training teknis pemasangan dan pemeliharaan air bersih menjadi hal yang mutlak dilakukan. Pelatihan ini dilaksanakan pada 14-15 November.

Studi banding

Upaya peningkatan kapasitas selain melalui kegiatan pelatihan, dapat pula dilakukan dengan cara studi banding seperti yang dilakukan oleh forum di Klaten. Pengurus forum mempelajari cara kerja forum PRB di daerah lain. Lokasi yang dipilih adalah desa Depok, Parangtritis, Jogjakarta. Di daerah ini forum belajar cara-cara pertolongan pertama menyelamatkan diri dari bencana tsunami, penggunaan alat-alat P3K dan alat pertolongan pertama lainnya. Selanjutnya forum juga melihat bagaimana forum PRB menyusun program dan melaksanakan program bersama masyarakat, serta peran apa saja yang telah dilakukan bersama



masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan tanggal 6 Desember dan sebagai hasilnya forum di Klaten akan membuat jalur evakuasi di daerahnya.

Simulasi evakuasi

Akan tetapi, bertanyalah kepada pengurus forum di Klaten, kegiatan apa yang paling berkesan? Ternyata bukan studi banding ke desa Depok. Melainkan pelatihan P3K dan simulasi evakuasi. Dengan bersemangat pengurus forum akan menceritakan hal-hal yang dipelajari selama pelatihan yang dilaksanakan pada tanggal 29 -30 November tersebut.

Acungan jempol layak ditujukan ke forum Klaten yang dengan gigih melobi kerjasama dengan PMI. Di Yogyakarta pelatihan ini dilaksanakan pada 6-7 November, sementara Magelang 9-10 Desember.

Membangun jejaring

Selain meningkatkan kapasitas, pengembangan jejaring sangat penting dilaksanakan untuk berbagi pengalaman dan dukungan. Forum menjalin hubungan, berkoordinasi dan bekerjasama dengan instansi terkait dalam bidang penanganan bencana sesuai fokus masing-masing wilayah.

Forum Yogyakarta bekerjasama dengan dinas, lembaga, dan sektor swasta yang bergerak di bidang sumberdaya air dan perpipaan. Demikian pula dengan Klaten yang menjadikan isu kesehatan sebagai *entry point* pengurangan risiko bencana, bekerjasama dengan pihak-pihak terkait. Di Magelang, upaya berjejaring dilakukan untuk membuat forum desa Ngargomulyo masuk ke dalam struktur forum di tingkat yang lebih tinggi.

Mempengaruhi kebijakan

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan forum dan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan bencana, akan lebih cepat perkembangan dampaknya jika mendapat dukungan dari pemerintah desa secara formal. Oleh karena itu, forum melakukan pendekatan agar aparat desa merancang Peraturan Desa (Perdes) tentang penanggulangan bencana dan mengalokasikan dana untuk penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Sejak awal tahun 2009, Forum di dusun Pucung mengiringi perancangan Perdes dimaksud. Kini hasilnya, desa Wukirsari telah memiliki Perdes dan penganggaran penanggulangan bencana.

Masih banyak lagi kegiatan, baik yang sudah maupun akan dilaksanakan. Semua kegiatan itu bagaikan langkah demi langkah yang diayunkan hingga mencapai tujuan, yaitu terciptanya masyarakat yang aman, siaga, dan mampu mengelola ancaman bencana di wilayahnya.



“Selama ini Ketika terjadi Bencana Saya hanya Takut..”

Bencana tidak perlu ditakuti sebab bencana terjadi karena kita tidak dapat mengatasinya. Untuk dapat mengatasi dan mengurangi dampak bahkan mungkin dapat mencegahnya, kita harus mengenali terlebih dahulu ancaman apa yang menyebabkan terjadinya bencana tersebut.

Pengenalan ancaman atau bahaya yang dapat menimbulkan bencana harus dilakukan sejak dini atau sejak usia anak-anak agar mereka tetap tenang ketika bencana terjadi dan mampu menghindari serta melindungi diri. Untuk itulah, pelatihan tentang pengurangan risiko bencana dan simulasi evakuasi bagi anak-anak sekolah diselenggarakan. Anak-anak dilatih untuk siap menghadapi bencana alam.

Agar menarik perhatian dan gampang dimengerti, penyampaian materi disampaikan lewat film animasi. Film menceritakan berbagai bentuk bencana di Indonesia, cara pencegahan, dan penanggulangannya. Lewat film tersebut, anak-anak dapat mencontoh tindakan yang bisa mereka dilakukan.

Di salah satu desa, fasilitator bertanya apa yang harus dilakukan saat terjadi gempa. Spontan seorang anak yang masih kecil menjawab, “Terbang saja, Pak!” Supaya *nggak* tertimpa bangunan atau pohon, ya... Agar tidak gampang lupa apa yang harus dilakukan jika terjadi gempa, sekaligus membuat suasana lebih bersemangat, fasilitator mengajarkan yel-yel. “Jika ada gempa, kita harus...” “Cepat tanggap dan jangan panik!” Anak-anak juga diajarkan nyanyian, “Kalau ada gempa, lindungi kepala! Kalau ada gempa, berlindung di kolong meja...!”



Anak - anak memperagakan penyelamatan diri terhadap gempa di kolong

Selain pemahaman tentang bencana, anak-anak juga dikenalkan pada jalur evakuasi dan diajak melakukan simulasi evakuasi. Anak-anak juga diingatkan pentingnya kerjasama, serta menolong temannya yang luka.

Anak-anak mendapatkan pengetahuan dan pengalaman baru melalui pelatihan simulasi evakuasi karena hal ini tidak mereka dapatkan di kegiatan di sekolah maupun lembaga

lain. Anak-anak juga senang mengikuti kegiatan *outbound*. Melalui kegiatan yang santai dan kesannya jalan-jalan, anak-anak dikenalkan pada wilayah di sekitar mereka yang dianggap rawan ketika terjadi bencana. Daerah yang rawan itu misalnya, sungai tempat aliran lahar dan lereng gunung.

F. Yeni Mei Triana, kelas VI SD Kanisius Prontakan, Desa Ngargomulyo, Kec. Dukun, Kab. Magelang, menuliskan perasaan dan pengalamannya. “...Pengalaman ini jelas tidak bisa dilupakan terutama karena saya diajak jalan-jalan, bermain-main dan menggambar. Karena selama ini ketika terjadi bencana saya hanya takut.” Setelah mengikuti kegiatan ini Yeni tidak takut lagi, apalagi dia sudah mengetahui jalur evakuasi.

Lain lagi yang dituturkan Arifin, kelas VI SD Guppi, di desa yang sama. Arifin menulis,

“ ... Saya tertarik dengan kegiatan simulasi evakuasi. Saking semangat saya sampai menubruk teman saya sehingga saya jatuh. Ketika mau simulasi evakuasi, ternyata ada pengarahan dari orang luar negeri. Katanya, kalau mau evakuasi jangan panik, nanti malah sakit sendiri.”

Sangat diharapkan pengenalan berbagai bencana disampaikan di kelas agar sejak dini anak-anak terlibat dalam penanggulangan bencana. Dan simulasi ini hendaknya dilakukan secara rutin di semua sekolah agar anak-anak tidak lagi takut, melainkan sudah tahu apa yang harus dilakukan bahkan siap membantu keluarga dan temannya.



Inilah team medis yang dibentuk untuk mengevakuasi temannya

Jeli Melihat Potensi, Siap Mencegah Bencana

Forum PRB Pucung

Selama program pengurangan risiko bencana (PRB) tahap I dilaksanakan di tiga wilayah dampingan Bina Swadaya, ada satu forum pengurangan bencana yang menjadi rujukan keberhasilan masyarakat memanfaatkan sumberdaya yang ada demi kepentingan bersama. Forum tersebut adalah Forum Pengurangan Risiko Bencana dusun Pucung, desa Wukirsari, kabupaten Bantul, Jogjakarta.

Forum PRB terbentuk dari kesadaran masyarakat bahwa bencana yang kerap terjadi belakangan ini dapat diminimalisir dampak dan jumlah korbannya. Upaya pengurangan dampak tersebut membutuhkan kerjasama dan partisipasi semua pihak, mulai dari warga, pemerintah, lembaga-lembaga yang ada atau berkarya di daerah tersebut, dsb. Kerjasama dan partisipasi tersebut akan jauh lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dalam sebuah wadah.

Pengurus forum terdiri dari seorang ketua dan seorang wakil, dua orang sekretaris dan dua orang bendahara. Sedangkan anggotanya merupakan warga dari 4 dukuh yang berada dalam wilayah administratif dusun Pucung. Masing-masing dukuh diwakili oleh 6 orang warganya, dimana salah seorang dari antaranya menjadi koordinator. Ke-4 dukuh tersebut adalah dukuh Dengkeng, Karangtalun, Karangasem, dan Jatirejo.

Warga yang terlibat dalam forum bukanlah orang-orang baru yang bekerjasama dengan Bina Swadaya. Mereka adalah para anggota kelompok dampingan usaha mikro Bina Swadaya Jogjakarta. Sehingga cukup mudah mengumpulkan anggota untuk berdiskusi tentang kesiapsiagaan menghadapi dan mengelola bencana. Pada awal pengenalan program PRB, masyarakat dusun Pucung sangat antusias mengikuti pelatihan dan diskusi. Termasuk di dalamnya memetakan potensi bencana, potensi wilayah, hingga membuat rencana aksi masyarakat.

Forum menemukan bahwa daerah Pucung tidak hanya terancam bahaya gempa, tetapi juga kekeringan yang setiap tahunnya melanda kurang lebih 800 KK yang tinggal di perbukitan. Berbagai usaha telah dilakukan, mulai dari menambah kedalaman sumur, reboisasi, hingga memanfaatkan sumber air yang sudah ada. Akan tetapi, karena daerah yang luas, maka perlu penanganan lebih lanjut. Selain kekeringan, daerah ini juga rawan longsor akibat pergerakan tanah. Warga selama ini sudah mengupayakan terasering dan pembangkitan tebing. Namun, masih banyak lokasi rawan longsor yang perlu ditangani, apalagi kondisi tanah yang terus bergerak, maka kegiatan pembangkitan ini perlu ditindaklanjuti. Oleh karena itu, Forum PRB dusun Pucung dilengkapi empat divisi kerja, yaitu divisi gempa bumi, longsor dan banjir, kekeringan, dan sosial. Divisi sosial berupaya mengajak dan memotivasi warga untuk hidup produktif dan terarah.

Tujuan forum adalah meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai potensi bencana yang ada di wilayahnya, menyiapkan masyarakat secara fisik dan psikologis terhadap

kemungkinan bencana yang akan datang, dan meningkatkan keswadayaan serta partisipasi masyarakat untuk bekerjasama dan berkoordinasi dalam suatu wadah kerjasama pengurangan risiko bencana.

Untuk mencapai tujuan di atas, rencana kegiatan yang akan dilakukan antara lain, melakukan berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi dan menanggapi bencana, membangun serta memperkuat jaringan kerjasama di berbagai tingkat pemerintahan, membangun *database* yang selalu diperbaharui, dan mendorong pemulihan serta penguatan ekonomi.

Permasalahan timbul saat program PRB tahap 1 dinyatakan hanya merupakan pengenalan PRB. Hal ini membuat anggota forum "*nglokro*", kehilangan semangat untuk meneruskan kegiatan kesiapsiagaan terhadap bencana. Akibatnya perencanaan yang telah dibuat hanya tertulis di atas kertas.

Saat sudah mengalami penurunan semangat, dari sekedar diskusi ringan tengah malam sambil ngopi, muncul kesadaran baru bahwa bahaya yang sudah mengintip adalah kekeringan, banjir, dan longsor. Karena kekeringan selalu melanda setiap tahunnya dan menimpa hampir seluruh warga, maka pada awalnya penanganan kekeringan menjadi prioritas.



Air Bersih : Diburu dan Direbut

Forum Pengurangan Risiko Bencana (Forum PRB) dusun Pucung, desa Wukirsari, kabupaten Bantul, Propinsi DIY, pada awalnya dibentuk untuk kesiapsiagaan menghadapi gempa. Sekarang, forum ini juga mengemban tugas desa untuk mengelola sarana air bersih yang menjadi program pemerintah untuk mengatasi kekeringan.

Menggali potensi yang ada

Saat pemetaan ancaman bencana, ditemukan potensi bencana di desa Wukirsari yang terjadi setiap tahun, yaitu kekeringan dan tanah longsor. Dari pemetaan potensi solusi, ditemukan sumber air bersih dalam jumlah yang besar dan sudah dikembangkan melalui proyek Pekerjaan Umum (PU) Pemerintah Propinsi DIY. Akan tetapi, sampai dengan bulan Januari 2008 masih terbengkalai rusak begitu saja karena tidak ada yang mengurus dan hanya segelintir masyarakat yang pernah menikmatinya. Pengurus forum dan masyarakat yang tergabung dalam anggota forum sepakat untuk mengelola sumber air bersih tersebut dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa Wukirsari. Melalui berbagai upaya dan rangkaian pertemuan antara Forum PRB dengan pemerintah desa, Kesbanglimas, dan instansi terkait yang difasilitasi oleh Bina Swadaya, pada akhirnya berbagai alat dan pengelolaan air bersih tersebut diserahkan kepada Forum PRB untuk dimanfaatkan demi kebutuhan masyarakat.

Keinginan baik tak selamanya disambut baik. Sempat ada



penolakan dari beberapa warga yang khawatir pengelolaan air bersih bukannya bertambah baik tetapi malah merugikan. Pihak desa juga terasa maju mundur dalam menyambut keinginan forum. Melalui proses diskusi yang panjang, pihak desa pada akhirnya memberi lampu hijau kepada forum untuk mengelola sarana air bersih yang ada di desa. Pihak desa mengeluarkan surat keputusan penugasan kepada forum untuk mengelola sarana air tersebut.

Setelah mendapatkan surat keputusan dari desa, pengurus forum berkoordinasi dengan Dinas PU sebagai pengelola proyek. Bak gayung bersambut, Dinas PU menyambut secara terbuka keinginan warga melalui forum untuk mengelola sarana air bersih tersebut. Hal ini didukung pula dengan peraturan proyek yang harus menyerahkan pengelolaan sarana air bersih tersebut kepada warga.

Melobi berbagai pihak

Selain sosialisasi ke setiap pihak yang terlibat, sosialisasi bersama antara semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) dirasakan perlu untuk kejelasan semua pihak. Pada tanggal 1 April 2008, sosialisasi diadakan dengan menghadirkan semua *stakeholder* yang terdiri dari aparat desa, Kesbanglinmas kabupaten, Satuan Kerja PDAM propinsi DIY, Dinas Pertambangan DIY (Disperindagkop), PT. WIKA sebagai pemborong proyek pompa, dan masyarakat desa Wukirsari.

Dukungan legal formal dari desa membuat Forum PRB ini menjadi percaya diri. Selain mendapat dukungan surat resmi, desa juga meminjamkan uang untuk modal dasar sebesar Rp. 5.000.000,-. Dalam perhitungan teknis yang dibantu oleh Satuan Kerja PDAM dan PT WIKA, Forum PRB membutuhkan dana yang luar biasa besar. Oleh karena itu, didampingi oleh Bina Swadaya, Forum PRB dengan keberanian yang menurut mereka sangat “luar biasa” mendatangi kantor kecamatan, kabupaten, kesbanglinmas, PT WIKA, PDAM dan Dinas Pertambangan DIY untuk mempresentasikan program alih kelola sarana air bersih ini. Di luar dugaan, meskipun sangat diharapkan, ternyata semua pihak mendukung kegiatan warga ini.

Pekerjaan merevitalisasi sarana air bersih ini bukan hanya pada manajemen pengelolaannya dan perbaikan jaringan. Akan tetapi, bagian terpentingnya adalah memulihkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki jaringan yang rusak. Hal yang baru sama sekali bagi para pengurus forum yang tidak mempunyai pengalaman perpipaan.

“Sudah kepalang basah dan tanggung untuk kembali,” kata Suryono, sang Ketua Forum. “Apapun yang terjadi kita jalani dengan coba-coba”. Walhasil, rapat pagi harian menjadi menu sehari-hari pengurus forum. Kesibukan ini karena sedemikian banyak permintaan, baik untuk perbaikan kerusakan maupun pemasangan pipa baru. Oleh karena tidak ada yang ahli dalam pemasangan pipa, tingkat kebocoran awal mencapai 50% apabila dibandingkan antara debit air yang masuk ke tanki dan air yang berhasil mengalir ke para pelanggan. Sangat besar memang. Menyikapi hal ini, pengurus bersama dengan fasilitator mendatangi ahlinya di Universitas Gajah Mada (UGM). UGM yang diwakili bagian *water plan* (perencanaan air) kemudian memfasilitasi workshop sistem distribusi air, jaringan, dan penentuan target. Pengurus forum belajar untuk membandingkan kapasitas yang dimiliki oleh sumber air dan panjang jaringan maksimal yang dapat terpenuhi.

Efektif dan transparan

Dalam menerapkan manajemen pengelolaan air bersih, para pengurus juga tidak berani menarik biaya terlalu tinggi. Biaya berlangganan Rp. 5000,- per bulan per pelanggan. Sementara untuk biaya perbaikan kerusakan belum ditarik pembayaran, hanya saja diwajibkan membantu yang bekerja. Sistem pembayaran juga diefektifkan sehingga jumlah pelanggan yang menunggak semakin hari semakin berkurang. Juga kebocoran jumlah air yang masuk dan keluar dapat dikurangi. Forum memfasilitasi pembayaran dengan dapat langsung membayar di kantor pengurus forum, juga dengan mendatangkan petugas penarik iuran. Harapannya, dengan tertib melakukan pembayaran dan laporan keuangan yang transparan kepada warga, sarana air bersih ini dapat menjadi BADAN USAHA MILIK DESA. Untuk mencapai ini semua, pengurus mengundang para tenaga ahli untuk melatih dalam bidang teknis perpipaan air bersih. Selain itu, sistem pengelolaan dibenahi agar mudah dilaksanakan, dipantau, dan dievaluasi, serta bersifat transparan. *Good governance* dicoba diterapkan dalam kegiatan ini.

Berbagai pihak diajak kerjasama, misalnya dengan Satuan Kerja PKPAM DIY. Kerjasama dibangun untuk melakukan revitalisasi, membuat analisis gambar teknis elevasi dan aset di sarana air bersih dusun Pucung, dan memperbaiki saluran primer sepanjang jalur transmisi yang rusak. Kerusakan jaringan ini disebabkan oleh pemasangan pipa yang kurang benar, terbakar saat ada warga yang mebakar sampah, atau karena sudah aus.

Dana masyarakat

Perluasan jaringan juga dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan kepada pelanggan. Perluasan jaringan dilakukan di RT 06 Jatirejo, RT 05 dan 06 Krangasem, dan RT 01 dan RT 02 Karangtalun. Revitalisasi ini selain menggunakan dana masyarakat, juga dibantu Cordaid dan beberapa LSM yang berkarya di desa Wukirsari.

Forum PRB PAB (Penyediaan Air Bersih) dusun Pucung ini resmi berdiri pada bulan Februari 2008. Berawal dari sebuah ketidak sengajaan dalam menemukan “bencana” kekeringan setiap tahun dan melihat kenyataan terjadi perebutan air di musim kemarau. Forum bekerja keras. Tanki air pembawa bantuan air bersih yang disalurkan oleh TAGANA (Taruna Tanggap Bencana) pun tak lagi salah sasaran. Air bersih memang belum dapat dinikmati oleh seluruh warga Desa Wukirsari. Akan tetapi, paling tidak kiprah kerja keras Forum PRB PAB dapat mengurangi permasalahan. Air memang diburu, tetapi tak perlu direbut (*ETSN*).



“BAYU” Sang Pendukung



Kesuksesan fasilitator Bina Swadaya Jogjakarta dalam melaksanakan program Pengurangan Risiko Bencana (PRB) untuk membantu mengatasi kekeringan tidak terlepas dari peranan pemerintah desa. Perangkat ini mempunyai andil yang sangat penting karena mendukung program yang berhasil menggerakkan masyarakat untuk bersama-sama mengatasi kekeringan. Pemain yang ada dibalik layar kesuksesan ini adalah sang Kepala Desa Wukirsari, **BAYU BINTORO, SE**.

Pria kelahiran Bantul, 28 Januari ini adalah anak pasangan keluarga Bpk. R. H. Harsoyo (alm) dan ibu Hj. Sriyatun BcHk. Menamatkan Sarjana Ekonomi di sebuah perguruan tinggi di kota Yogyakarta tahun 2005, kemudian sempat berkarya diperbankan. Pekerjaan tetap yang menjadi idaman para pemuda di desanya itu ternyata tak membuatnya bahagia. Pengalamannya di berbagai bidang organisasi kemasyarakatan membuatnya terpanggil untuk memajukan desanya, sehingga ia memutuskan kembali ke desa menjadi kepala desa.

Kepala desa, sebuah jabatan penuh pengabdian kepada masyarakat ternyata memberinya ujian yang cukup berat. Baru beberapa bulan menjabat sebagai kepala desa, gempa bumi yang dahsyat melanda Jogjakarta dan sekitarnya. Kerusakan yang terjadi di desanya juga cukup dahsyat, 90% rumah dan bangunan di desa Wukirsari hancur dan rusak berat.

Pengalamannya di berbagai organisasi kepemudaan membuatnya dapat bertindak cepat mengatasi masalah. Bersama pengurus desa, mereka bahu membahu mengatasi masalah dalam fase tanggap darurat. Bantuan-bantuan yang mengalir ke desa juga dikoordinir secara terpadu sehingga semua masyarakat dapat menikmati bantuan.

Tidak hanya berhenti pada saat tanggap darurat, pada fase rehabilitasi dan rekonstruksi, kerjasama dengan pihak luar juga dilakukan untuk memulihkan keadaan pasca gempa. Integrasi program yang disodorkan oleh pemerintah dan LSM ataupun lembaga donor menjadi prioritas utama sehingga duplikasi program tidak terjadi. Lembaga-lembaga yang berhasil digandeng untuk mempercepat pemulihan pasca gempa antara lain, IRE Jogjakarta, Java Reconstruction Fund, CWS Internasional, JICA Indonesia, Cordaid, dan Bina Swadaya. Lembaga donor dan LSM lokal ini berkerja bukan hanya merehabilitasi bangunan yang rusak tetapi juga merehabilitasi bidang ekonomi.

Visi dan misi yang diembannya juga jelas dan aplikatif, yaitu membawa masyarakat desa Wukirsari pada peningkatan ekonomi dengan memaksimalkan sumber daya yang ada. Tindakan kongkret yang dilakukan adalah mendukung sepenuhnya proses revitalisasi sumber daya air yang telah tersedia di desa Wukirsari yang dilakukan bersama Cordaid dan Bina Swadaya. Setiap tahun, masyarakat desa Wukirsari selalu mengalami kekeringan. Mau tidak mau, mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli air untuk memenuhi keperluan sehari-hari, walaupun sudah ada bantuan dropping air bersih dari pemerintah. Kekeringan yang berlangsung terus menerus telah mengakibatkan pemiskinan pada masyarakat desa Wukirsari.

Dukungan dan kemampuan memotivasi masyarakat melalui Forum PRB yang difasilitasi pembentukannya oleh Bina Swadaya menjadikan cambuk semangat kerja yang patut diacungi dua jempol. Forum FPRB yang sedianya ditumbuhkan untuk kesiapsiagaan menghadapi gempa bumi, saat ini memulai kegiatannya menjadi ujung tombak peredaman risiko bencana kekeringan. Hal ini tak lepas dari kemampuan “Sang Bayu” meniupkan angin keterbukaan dalam mengelola sumber daya air yang telah disediakan pemerintah. Dan semoga harapan mengelola sumber air desa untuk dijadikan sumber pendapatan desa dapat segera terwujud sejalan dengan bertiupnya Bayu melalui *good governance* yang saat ini diterapkan.

Ing Ngarso Sung Tuladha ing Madya Mangun Karsa, Tut Wuri Handayani, Pak Bayu... (SSU).



Jika saja setiap orang mengucapkan satu kata kebaikan atau melakukan satu kebaikan setiap harinya, semua kebaikan kecil akan menjadi besar
(*Master Sheng Yen*)